



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SARYADI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **147865**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.561.827.000**

1. Tanah Seluas 248 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI
Rp. 330.000.000
2. Tanah Seluas 2287 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp.
250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
4. Tanah Seluas 319 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp.
31.827.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 584.650.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
4.500.000
2. LAINNYA, SEPEDA ONTHEL 1 UNIT LIPAT Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000
3. MOBIL, DATSUN 510 Tahun 1972, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 176.100.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 941.456.472****F. HARTA LAINNYA****Rp. ---****Sub Total****Rp. 3.264.033.472****III. HUTANG****Rp. 15.000**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.264.018.472

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.